



Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banjarmasin

Ahmad Dinnur Kamil ¹, Safriansyah ^{2*}

^{1,2} STIE Indonesia Banjarmasin, Indonesia

*) Correspondent Author: safriansyah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability, transparency and oversight on the performance of public services in the Regional Work Units in the Banjarmasin City Government. The analysis was carried out on the answers of 250 respondents to the research instruments submitted to the civil servants in charge of the Banjarmasin City Government Regional Work Unit. The hypothesis testing is done by employing multiple linear regression analysis. The results of the study show that accountability, transparency, and oversight have a significant effect on the performance of public services in the Regional Work Units in the Government of Banjarmasin. Partially, accountability, transparency, and oversight have a significant effect on the performance of public services in the Regional Work Units in the Banjarmasin City Government.

Keywords: Accountability, Transparency, Oversight, Service Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin, baik secara simultan maupun parsial. Analisis dilakukan pada jawaban 250 responden terhadap instrumen penelitian yang disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. Secara parsial, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin.

Keywords: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Pelayanan

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Proses perencanaan dimulai dengan kegiatan perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedaoman RPJMD kemudian membuat rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD. Kemudian pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan transparansi publik. Dimana setiap SKPD mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik, SKPD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lain halnya dengan transparansi publik, SKPD bersedia menyediakan informasi yang cukup, akurat, relevan dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya kepada pihak luar, tentunya dalam hal ini masyarakat umum/publik. Pada akhirnya akuntabilitas publik dan transparansi publik menjadi suatu kebutuhan pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari atasan langsung (kepala SKPD) yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masingmasing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawas intern (Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)) dan pengawas ekstern (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pengawasan yang ketiga dilakukan oleh lembaga lesgislatif (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara trasnsparan, ekonomis, efesien, efektif, responsif dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan analisis beban kerja untuk menentukan besaran organisasi, pemerintah daerah dituntut oleh Peraturan Daerah untuk dapat mewujudkan lembaga perangkat daerah yang efektif dan efisien

yang memiliki struktur minimal namun kaya fungsi. Faktor tersebut meliputi jumlah penduduk, kebutuhan daerah, dan kemampuan daerah (APBD). Mengingat tingginya kepadatan penduduk pada Kota Banjarmasin, tentu APBD di Pemerintah Kota memiliki jumlah yang lebih banyak dari pada di Kabupaten-Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 tepatnya pada bulan April Pemerintah Kota Banjarmasin berhasil mendapatkan nilai B untuk kategori SAKIP dan B untuk nilai Reformasi Birokrasi (RB). Sedangkan nilai SAKIPnya, nomor dua tertinggi setelah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertolak dari data tersebut tentu posisi nomor dua untuk Pemerintah Kota sangat memberikan pukulan keras, apalagi nilai tersebut di bawah dari nilai yang didapatkan oleh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hermansyah, Rahman dan Suherman (2018), menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu output dari terciptanya prinsip dasar *good governance*. Selanjutnya Mulkhadimah (2022), menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengaruh akuntabilitas dengan kinerja pelayanan publik. Kushartiningsih (2021), menyatakan transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik. Hal ini dipertegas dalam penelitian Khoiriyah dan Rahayu (2021), bahwa transparansi merupakan salah satu faktor pendukung terpenting dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tonny (2021), tentang Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, yang membedakan penelitian ini adalah adanya variabel transparansi dan pengawasan yang ditambahkan dari penelitian Kushartiningsih (2021), tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

2. Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengambil suatu keputusan kepentingan publik untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya akuntabilitas publik merupakan standar profesional aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki kaitan erat dalam membangun kinerja pelayanan public yang baik. Dalam proses perkembangan suatu organisasi, ketika akuntabilitas suatu organisasi tersebut dikatakan baik maka akan berpengaruh juga pada hasil kinerja pelayanan tersebut

(Kushartiningsih, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulkhadimah (2022), Putra (2014), Kushartiningsih (2021), Afifah (2022), dan Rahayu (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan public

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka. Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintahan tersebut (Putra, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulkhadimah (2022), Putra (2014), Turulaki, Tinango, dan Wokas (2017), Kushartiningsih (2021), Afifah (2022), dan Rahayu (2022), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan analisis teori dan kajian penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis berikut.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka. Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintahan tersebut (Putra, 2014).

Mulkhadimah (2022), Putra (2014), Turulaki, Tinango, dan Wokas (2017), Kushartiningsih (2021), Afifah (2022), dan Rahayu (2022), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan analisis teori dan kajian penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis berikut.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan public

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Undang-Undang Pembendaharaan Negara, Tanggal 30 Agustus 1970 dalam Baswir (2000: 118), Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-

aturan dan tujuan. Menurut Baswir (2000: 118), Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Apabila terdapat indikasi-indikasi 34 penyimpangan hal ini dapat segera dideteksi dan dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan.

Kushartiningsih (2021), dan Afifah (2022), menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan analisis teori dan kajian penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis berikut.

H₃ : Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik

3. Metode Penelitian

Populasi penelitian berasal dari 5 Lembaga Teknis Daerah dan 18 Dinas Daerah sebanyak ada 23 SKPD, dengan sebaran berjumlah 664 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 250 orang.

Untuk menentukan ketepatan prediksi apakah ada pengaruh yang kuat antara variabel terikat (Y) kinerja pelayanan dengan variabel bebas kualitas pelayanan yang terdiri dari akuntabilitas (X₁), transparansi (X₂) dan pengawasan (X₃), maka dalam penelitian ini menggunakan rumus regresi berganda, karena lebih dari satu variabel. Berikut ini persamaan yang digunakan dalam analisis regresi berganda :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : Kinerja Pelayanan / Variabel Terikat (Dependent)

X₁ : Akuntabilitas / Variabel Bebas (Independent)

X₂ : Transparansi / Variabel Bebas (Independent)

X₃ : Pengawasan / Variabel Bebas (Independent)

a : Bilangan Konstanta regresi

b : angka koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

e : Error Terms

4. Analisis dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a				
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F
				Sig.

1	Regression	1042.524	3	347.508	15.266	.000 ^b
	Residual	5599.752	246	22.763		
	Total	6642.276	249			

a. Dependent Variable: Kinerja Pelayanan

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	24.942	3.491		7.145	.000
AKUNTABILITAS	.802	.134	.455	5.976	.000
TRANSPARANSI	.103	.082	.084	2.251	.012
PENGAWASAN	.470	.132	.264	3.567	.000

a. Dependent Variable: KINERJA PELAYANAN

Sumber : Data Diolah, 2023

Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banjarmasin

Hasil analisis uji simultan (Tabel 1) yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini sejalan dengan Renita Kushartiningsih (2021), Kushartiningsih (2021), dan Afifah (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil olah data tabel *coefficients*, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas mendapatkan statistik t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis diterima bahwa ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Mulkhadimah (2022), Putra (2014), Kushartiningsih (2021), Afifah (2022), dan Rahayu (2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Transparansi mendapatkan statistik uji t hitung lebih besar dari pada t tabel, dan nilai sig lebih kecil dari pada nilai yang sudah ditentukan. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Mulkhadimah (2022), Putra (2014), Turulaki, Tinango, dan Wokas (2017), Kushartiningsih (2021), Afifah (2022), dan Rahayu (2022), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik.

Selanjutnya untuk variabel pengawasan mendapatkan statistik uji t hitung lebih besar dari pada t tabel, dan nilai sig lebih kecil dari pada nilai yang sudah ditentukan. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. Temuan penelitian ini sejalan dengan Kushartiningsih (2021), dan Afifah (2022), yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik.

Seberapa Besar Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R^2 (R Square) adalah sebesar 0,558 dan nilai Adjusted R Square besarnya pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sebesar 0,549 terhadap kinerja pelayanan publik (Tabel 2).

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen maka dapat dilihat dari nilai R yang didapatkan. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R yang didapatkan dalam penelitian ini berjumlah 0,696, dimana nilai tersebut termasuk pada kategori 0,51 sampai dengan 0,99 yang termasuk pada kategori korelasi yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk pada kategori korelasi yang kuat

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Mulkhadimah (2022), Putra (2014), Kushartiningsih (2021), Afifah (2022), dan Rahayu (2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik yang termasuk pada kategori korelasi yang kuat.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai berikut.

- Secara simultan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin
- Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin
- Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin
- Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran-saran berikut :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin
2. Pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk mengukur terhadap kinerja pelayanan publik, sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan program studi akuntansi.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2015). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Afifah, N., & Fitria, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik di Samsat Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(8).
- Agoes Sukrisno dan Ardana, I Cenik. (2019). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arep, Ishak, dan Tanjung, H. (2018). *Manajemen Motivasi*. Jakarta: PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia

- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21-29.
- Khoiriyah, N. dan Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja pegawai. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), pp. 1-17.
- Krina. (2012). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Cetakan ke-5*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kushartiningih, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3),
- Mulkhadimah, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Puskesmas saat Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Puskesmas se-Kota Pekanbaru). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 20(3), 66-77.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006. Tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Rahayu, Riany Depita (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan (Sensus Pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2021). *Sarjana thesis*, Universitas Siliwangi
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana
- Robbins, S. P. (2017). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tonnyl, T. (2022). Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Kongbeng kabupaten Kutai Timur, 1(1). *Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*. Hal 123-140.
- Turulaki, S., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. (2017). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta : Rineka Cipta.

